

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hijaz adalah negeri kelahiran Islam dan sering disebut sebagai pusat keagamaan Islam. Dua kota suci umat Islam yang sangat terkenal dan bersejarah, yaitu Mekah dan Madinah, juga terletak di sana.¹ Mekah sendiri adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kota tempat Nabi pertama kali menerima wahyu dan mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam. Di kota ini terletak Ka'bah, kiblat umat Islam dalam shalat. Ke kota ini pula umat Islam datang setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima.²

Mayoritas para haji sebelum atau sesudah menunaikan ibadah haji hampir dapat dipastikan akan mengunjungi kota Madinah untuk tujuan ziarah, karena di sana terdapat makam Nabi Muhammad SAW dan tempat-tempat bersejarah dalam perkembangan awal Islam. Madinah adalah kota tempat negara Islam pertama berdiri dan dari sanalah perluasan Islam bermula.³ Sejak berdirinya negara Islam hingga berakhirnya pemerintahan Khulafā' al-Rāshidūn, kota Mekah dan Madinah menjadi pusat politik dan rohani Islam sekaligus.⁴

Setelah berpindahnya kekuasaan politik dari Khulafā' al-Rāshidūn ke tangan Bani 'Umayyah, negeri ini tidak pernah lagi menjadi pusat kekuasaan politik

¹ Hijaz adalah satu dari lima area di Jazirah Arab. Empat area lainnya adalah Yaman, Tihamah, Nejd, dan Arud. Muḥammad Bayyūmī Maḥrān, *Dirāsāt fī Tārīkh al-'Arab al-Qadīm* (Riyadh: al-Matābi' al-Ahliyyah, 1997), 98.

² Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, penerjemah Zakiyuddin Bhaidawy (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 112.

³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 52.

⁴ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 56.

Islam. Sejak itu, Hijaz secara berangsur-angsur tenggelam, tidak memainkan peran penting lagi dalam sejarah. Bersamaan dengan penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin awal, banyak penduduk Jazirah Arab, terutama Hijaz, melakukan imigrasi dan menetap di daerah-daerah yang baru ditaklukan.⁵

Setelah penaklukan-penaklukan gemilang yang menandai awal suatu zaman baru dalam peradaban Timur Tengah itu bangsa Arab justru membiarkan Arabia mengeluarkan banyak penduduknya. Sejak saat itu Jazirah Arab, termasuk di dalamnya Hijaz, berdiri di luar *mainstream* perkembangan Timur Tengah.⁶ Bahkan, setelah kejayaan al-Khilāfah al-‘Abbāsiyyah runtuh, kekuatan politik bangsa Arab, pembawa kebangkitan Islam pertama itu dengan cepat merosot dan nampak terlupakan.⁷ Hampir seluruh wilayah Arab, sejak itu, berada di bawah kekuasaan politik non-Arab.

Setelah Imperium Turki ‘Uthmānī menguasai negeri-negeri Arab di awal abad ke-16 M, Mesir dan Jazirah Arab berubah menjadi propinsi-propinsi bagian dari Imperium ‘Uthmānī. Hal yang demikian berlangsung sampai awal abad ke-20 M. Namun, di beberapa wilayah pinggiran kekuatan politik bangsa Arab masih bertahan, tetapi hanya dalam batas-batas wilayah yang sempit, bahkan diantaranya hanya dalam bentuk keamiran (*al-‘Imārah*).⁸

⁵ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), 92.

⁶ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University, 1989), 668.

⁷ Aḥmad al-Sibā'ī, *Tārīkh Mekah*, Vol. 1 (Mekah: Maktabah al-Ṣafā, 1420), 5.

⁸ Abdul Chalik, *Islam dan Kekuasaan: Dinamika Politik dan Perebutan dalam Ruang Negara* (Yogyakarta: Interpena, 2012), 80.

Hijaz sendiri, sejak munculnya dinasti-dinasti kecil dalam sejarah Islam, hampir selalu berada di bawah pengaruh politik dinasti yang berkuasa di Mesir. Ketika Imperium Turki ‘Uthmānī menguasai negeri-negeri Arab, Mesir menjadi salah satu propinsinya. Ketika itu, penguasa Hijaz merasa bahwa Turki ‘Uthmānī adalah pewaris kepemimpinan Islam, dan dipandang sebagai penjaga agama dan pengibar bendera jihad melawan orang kafir. Oleh karena itu, *Sharīf* Mekah - sebutan untuk penguasa Hijaz - tidak merasa keberatan menyerahkan kunci Ka’bah kepada Sultan ‘Uthmānī, Salīm I, sebagai bukti bahwa mereka sedia menyerahkan kepemimpinan Hijaz kepada Turki ‘Uthmānī tidak lama setelah Sultan berhasil mengalahkan Dinasti Mamālīk dan menguasai Mesir pada 1517 M. Sebagaimana sebelumnya, pada masa pendudukan Turki ‘Uthmānī ini Hijaz mula-mula merupakan bagian dari wilayah (propinsi) Mesir itu.⁹

Pada masa-masa tersebut, di Jazirah Arab terjalin hubungan yang cukup mesra antara penguasa (*Sharīf*) Mekah dengan Istanbul Turki yang akhirnya menjadi rusak dengan bangkitnya gerakan keagamaan di Semenanjung Arab yang didirikan oleh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhāb. Gerakan ini di kenal dengan gerakan Wahhabi.¹⁰ Gerakan ini selanjutnya memiliki pengaruh yang besar terhadap pranata sosial Islam di Indonesia, khususnya pada akhir zaman penjajahan Belanda.¹¹

⁹ Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci: Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 3.

¹⁰ Fabe Armanions, “The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafīyya”, dalam CRS Report for Congress, www.fas.org/sgp/crs/misc/RS21695.pdf. (20 Maret 2013), 1.

¹¹ Ali Mufradi, *Pranata Sosial Islam di Indonesia 1900-1942: Politik dan Pendidikan* (Surabaya: Alpha, 2007), 98. Lihat juga, Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 133.

Ketika mencapai kekuatan politik dan militer, gerakan ini secara sistematis menghancurkan segala sesuatu yang dipandang penyebab berkembangnya ajaran-ajaran bid'ah dalam Islam. Muhammad bin 'Abd al-Wahhāb dilindungi oleh penguasa Nejd, Muhammad bin Sa'ūd yang berkedudukan di Dar'iyyah. Antusiasme pemurniannya menjadi kekuatan yang menentukan di balik ekspansi politik keluarga Saudi. Di akhir abad ke-18 M, seluruh Nejd sudah dapat mereka duduki, bahkan Irak sudah pula mereka serang. Kota-kota suci di Hijaz mereka kuasai dan mereka bersihkan dari praktik-praktik yang dipandang bertentangan dengan paham yang mereka anut.¹²

Sejak bangkitnya gerakan Wahabbi yang bersekutu dengan keluarga Saudi itu, Jazirah Arab, terutama daerah Hijaz, menjadi ajang perebutan pengaruh yang melibatkan banyak pihak. Secara alamiah penguasa Turki 'Uthmānī terdorong untuk melakukan suatu reaksi, dan Sultan memerintahkan gubernur Mesir, Muhammad 'Alī Pāshā, untuk menghadapi orang-orang Wahhabi. Pada tahun 1818 Muhammad Ibrāhim Pāshā, putera dari Muhammad 'Alī Pāshā berhasil menaklukkan Dar'iyyah pusat gerakan Wahhabi ketika itu, dan juga menduduki Hijaz. Orang-orang Turki kemudian didatangkan ke Hijaz untuk mengamankan kepentingan politik kerajaan Turki 'Uthmānī disana. Sementara di Nejd, Turki 'Uthmānī mendukung penguasa lokal, keluarga Rashīdiyyah, yang menjadi musuh

¹² Dalam ajarannya, kelompok ini tidak segan-segan melakukan *takfir* kepada siapa saja yang telah melanggar sepuluh pembatal Islam, yang salah satunya adalah hukum kafir terhadap individu atau kelompok yang membiarkan, ragu atau membenarkan kesalahan aqidah yang dilakukan oleh orang Islam yang telah melanggar sepuluh pembatal Islam yang telah mereka susun ini. Muḥammad bin 'Abd al-Wahhāb, *Nawāqid al-Islām* dalam *Matan al-Tauhīd wa al-'Aqīdah* (Mekkah: Dār Ibn 'Umar, 2003), 159.

keluarga Saudi. Namun, justru setelah itu, Muhammad ‘Alī Pāshā, gubernur Mesir, merasa besar dan siap bersaing melawan Sultan Turki ‘Uthmānī di Istanbul.¹³

Pada saat Perang Dunia I mulai berkobar, banyak pemimpin Arab mulai ragu-ragu terhadap masa depan negerinya bila tetap berada dibawah kontrol Turki ‘Uthmānī. Mengetahui hal itu, pada tahun 1916 M seorang komisaris tinggi Inggris yang berkedudukan di Kairo, Mesir berhasil membujuk *Sharīf* Mekah, kepala keluarga Arab yang menguasai kota-kota suci sebagai wakil Sultan, untuk bersekutu dengan Inggris yang menjanjikan kemerdekaan Arab, dalam melawan orang-orang Turki ‘Uthmānī di Hijaz. *Sharīf* Mekah yang kemudian dikenal dengan Raja Ḥusayn ini menyambut ajakan itu dan bertekad untuk mewujudkan negara Arab bersatu di Asia dengan Mekah sebagai pusatnya. Dia kemudian mengirim anaknya yang bernama Faisal untuk menjadi penguasa ke Syiria pada tahun 1918 M dan berhasil mendirikan pemerintahannya di Damaskus, sementara anaknya yang lain, Abdullah, juga dikirim ke Irak.¹⁴

Akan tetapi, setelah wilayah Arab di Asia dibagi-bagi kepada Inggris (Irak dan Palestina) dan Perancis (Syiria dan Libanon) pada tahun 1920 M, cita-cita negara Arab bersatu itu mulai mengendur. Kalau sebelumnya Raja Ḥusayn dipandang sebagai Raja Arab, setelah itu dia hanya diakui sebagai penguasa Hijaz. Ambisi Raja Ḥusayn itu betul-betul sirna setelah ‘Abd al-Azīz bin Sa‘ūd, pimpinan gerakan Wahhabi asal Nejd, pada tahun 1924 M mengadakan serangan serius terhadap Hijaz. Serangan itu mengakhiri kekuasaan Raja Ḥusayn di sana, dan dia

¹³ Philip K. Hitti, *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present*, Terjemah Cecep Lukman Yasin, dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu, 2010), 927.

¹⁴ Badri Yatim, *Sejarah Sosial*, 4.

sendiri akhirnya melarikan diri ke Amman, Yordania. ‘Abd al-Azīz bin Sa’ūd kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Hijaz dan Nejd, Raja yang sungguh-sungguh menguasai sebagian besar Jazirah Arab. Inilah tonggak awal kemunculan negara Arab Saudi modern yang masih tetap eksis sampai saat ini.¹⁵

Memang banyak kesamaan antara perkembangan satu daerah Arab dengan daerah Arab lainnya pada tahun 1800 M sampai 1925 M. Hampir seluruhnya mengadakan pemberontakan terhadap kekuasaan Turki ‘Uthmānī dan hampir seluruhnya pula dapat dipadamkan, meskipun akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan Barat.¹⁶ Namun, perkembangan yang terjadi di Jazirah Arab, terutama di Hijaz dapat dikatakan unik. Di sini pergolakan politik yang terpenting, gerakan Dinasti Saudi, berkaitan sangat erat dengan munculnya satu gerakan reformis yang mendahuluinya yang dikenal dengan gerakan Wahhabi. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya keduanya tidak dapat dipisahkan.¹⁷

Dengan demikian, pergolakan politik di Jazirah Arab, termasuk Hijaz, di samping merupakan perebutan kekuasaan, juga dikatakan sebagai pencerminan dari persaingan antara paham keagamaan lama dengan paham yang baru. Ulama dan lembaga-lembaga keagamaan lama tidak bersedia menanggung resiko kehilangan pengaruh bila Dinasti Saudi memperoleh kemenangan. Dalam perebutan kekuasaan

¹⁵ Abdullah Mohammad Sindi, “Britain and the Rise of Wahhabism and the House of Saud”, dalam *Kana’an Bulletin*, www.kanaanonline.org (20 Maret 2013), 2.

¹⁶ Sukran Kamil, *Pemikiran Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi* (Jakarta: Kencana, 2013), 56.

¹⁷ Ahmad Dallal, “The Origins and Objectives of Islamic Revivalist Thought (1750-1850)”, dalam *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 113. No. 3 (Juli-September 1993), 342.

itu akhirnya Dinasti Saudi yang menganut paham Wahhabi memang memperoleh kemenangan dan bahkan menetapkan paham itu sebagai paham negara.¹⁸

Kemenangan politik Dinasti Su'ūd ini adalah juga hasil dari keberhasilan gerakan dakwahnya. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin perubahan-perubahan sosial-keagamaan sudah terjadi sebelum atau menjelang kemenangan politiknya tersebut. Kernungkinan hal itu didukung oleh kenyataan bahwa ketika Ibn Sa'ūd berhasil menduduki kota-kota suci Islam di Hijaz dengan mengalahkan Raja Ḥusayn, ia langsung menjadi pemimpin yang sangat dihormati di Jazirah Arab bahkan di seluruh Dunia Arab.¹⁹

Hal yang menarik lainnya adalah bahwa perubahan paham keagamaan itu berlangsung di dua kota suci Islam yang merupakan pusat studi tradisional keagamaan Islam sejak berabad-abad. Paham yang sudah lama mengakar di sana dan kemudian juga menyebar ke segala penjuru dunia Islam, dalam waktu yang dapat dikatakan tidak terlalu lama, harus menerima kehadiran paham baru yang justru menjadi lebih dominan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengetahui proses perubahan itu sebenarnya.

Perubahan-pembaharuan politik dan paham keagamaan di Semenanjung Arab yang dimotori oleh pengikut Muhammad bin 'Abd al-Wahhāb dan Bani Su'ūd dengan gerakan Wahhabi-nya tentu saja mendatangkan perubahan-perubahan dalam bidang-bidang sosial-budaya lainnya. Apalagi, awal abad ke-19 M merupakan masa ketika gerakan pembaharuan dalam Islam baru mulai bangkit.

¹⁸ Philip K. Hitti, *History of*, 948.

¹⁹ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah* (Jakarta: Djambatan, 1995), 43.

Gerakan pembaharuan dalam Islam itu tentu saja juga membawa dampak tertentu pada kehidupan sosial keagamaan Islam di Hijaz, bahkan juga di seluruh penjuru dunia Islam termasuk Indonesia sampai saat ini.²⁰ Semua itu telah mendorong penulis untuk memilih judul: *Dinamika Politik Islam di Semenanjung Arab 1800-1930 M: Pengaruh Berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern Terhadap Praktik Sosial Keagamaan di Tanah Suci*.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang permasalahan, maka fokus kajian penelitian adalah mengetahui perkembangan dan dinamika politik Islam di Semenanjung Arab tahun 1800-1930 M. Lebih lanjut, kajian ini bermaksud mengemukakan secara terperinci keadaan sosial politik dan keagamaan saat terjadinya pembaharuan Wahhabi yang bekerjasama dengan Bani Su'ūd di Jazirah Arab serta pengaruhnya terhadap praktik politik dan keagamaan yang sudah berjalan sangat lama di sana.

Dengan judul di atas, juga jelas terlihat pembatasan masalah yang paling tidak terdiri dari pembatasan waktu, pembatasan ruang, dan pembatasan objek penelitian. Semenanjung Arab adalah pembatasan ruang dengan Mekah dan Madinah sebagai ruang yang paling dominan diteliti. Tahun 1800-1930 M adalah pembatasan waktu. Dipilih tahun tersebut dengan asumsi bahwa tahun 1800 M adalah awal masa kebangkitan dan periode modern di dunia Arab khususnya dan

²⁰ Tentang gerakan pembaruan di Indonesia dan hubungannya dengan keadaan politik dan intelektual di tanah Hijaz, lihat: Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), 38. Juga lihat, Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 76.

dunia Islam pada umumnya.²¹ Lebih spesifik lagi, tahun 1800 M adalah awal kebangkitan gerakan Wahhabi di Hijaz. Adapun tahun 1930 M adalah masa ketika Turki ‘Uthmānī benar-benar telah runtuh dan melepaskan segala tuntutan kekuasaan politiknya terhadap wilayah-wilayah Arab sebagai akibat kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Dalam kasus Hijaz sendiri, saat itu kekuasaan Saudi Arabia telah bermula dan berhasil memantapkan kekuasaan politiknya disana. Sedangkan pengaruh berdirinya kerajaan Arab Saudi modern terhadap praktik politik dan keagamaan di tanah suci adalah pembatasan objek penelitian.

Melalui eksplanasi yang mencoba menghubungkan keduanya akan diperoleh seperangkat teori dan pernyataan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dengan cara ini tujuan penelitian dapat dicapai secara komprehensif.

C. Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan yang diajukan untuk dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan sosial politik dan sosial keagamaan di Hijaz sebelum abad ke-19?
2. Apa saja perubahan politik yang terjadi di Semenanjung Arab antara tahun 1800 sampai dengan 1930 M?
3. Apa pengaruh yang terjadi dalam aspek sosial keagamaan dengan berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern?

²¹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 84.

D. Tujuan Penelitian

Pararel dengan topik tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan keadaan sosial politik dan sosial keagamaan di Hijaz sebelum abad ke-19.
2. Menganalisis perubahan-perubahan politik yang terjadi di semenanjung Arab antara tahun 1800 sampai dengan 1930 M.
3. Menemukan pengaruh yang ditimbulkan, khususnya dalam aspek sosial keagamaan atas berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern.

E. Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermanfaat dan penting baik secara teoritis (ilmiah) maupun praktis (amaliah).

Diantara manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dinamika perkembangan politik Islam di Jazirah Arab pada tahun 1800-1930 serta pengaruh pembaharuan tersebut bagi praktik politik dan sosial keagamaan di Mekah dan Madinah. Yang mana gerakan pembaharuan yang terjadi di Jazirah Arab ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peta pergerakan dan pemikiran Islam di dunia. Dengan memahami kondisi sosio-politik yang terjadi, diharapkan dapat lebih memperluas wawasannya dalam membaca fenomena-fenomena dalam dunia Islam yang terjadi sesudahnya.

2. Manfaat secara praktis

Gerakan pembaharuan Wahhabi di Arab Saudi masih menyisakan kontroversi yang besar bagi umat Islam dewasa ini. Ada kelompok yang sangat mengagung-agungkan kebesaran kerajaan Bani Su'ūd dan kesuksesannya dalam menjalankan syariat Islam yang *kaffah* di negaranya sehingga menurut mereka patut dan harus dicontoh oleh dunia Islam, namun di sisi lain juga tidak sedikit menerima hujatan dari golongan Islam yang lain karena dianggap telah memanfaatkan agama sebagai dasar legitimasi untuk mendapatkan kekuasaan.

Maka, dengan lebih memahami dinamika politik dan perkembangan yang ada ketika itu, akan memberikan pengetahuan dan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat berdampak pada keobjektifan dalam menilai dan menghukumi fenomena-fenomena yang terjadi di Jazirah Arab saat ini, tanpa dibarengi kebencian atau kefanatikan yang membabi buta.

F. Penelitian Terdahulu

Ketika mengambil keputusan untuk mengangkat tema politik Islam Hijaz abad ke-19 ini, sebenarnya penulis sudah mengira bahwa dalam penelitiannya, penulis akan menemukan banyak kendala terkait dengan sumber rujukan dan juga hasil-hasil penelitian terdahulu yang diakui sangat jarang ditemukan. Diantara penelitian terdahulu yang sangat membantu penulis dalam penelitian ini adalah Tesis Ali Mufrodi dalam Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel pada tahun 1988 yang berjudul Wahhabiyah dan Perkembangannya Pada Fase Pertama. Dalam penelitiannya tersebut, Ali Mufrodi mengungkap sejarah munculnya aliran

Wahhabiyah dan perkembangannya serta pengaruh politik dan keagamaan yang ditimbulkan pada fase pertama di Semenanjung Arab.

Hasil penelitian lain yang menjadi pertimbangan berharga bagi peneliti adalah Tesis yang berjudul *Pemikiran Teologi dan Gerakan Purifikasi Wahhabi* karya Bakir Yusuf Basmawi. Dalam Tesis ini penulis mencoba mengungkap pemikiran teologi Wahhabi di Arab Saudi serta gerakan-gerakan purifikasi yang mereka cetuskan.

Tulisan lain yang tidak kalah berharga adalah Disertasi Badri Yatim dalam Program Pascasarjana IAIN Sharif Hidayatullah pada tahun 1998 yang berjudul *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci*. Dalam penelitiannya tersebut, Badri Yatim mengungkap perubahan-perubahan praktik keagamaan yang diakibatkan oleh runtuhnya kekuasaan Turki 'Uthmānī di Semenanjung Arab.

Berkaitan dengan tulisan-tulisan di atas, ada beberapa titik persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis saat ini yaitu tentang diangkatnya tema wilayah Semenanjung Arab dan Wahhabi serta gerakan purifikasi yang mereka lakukan. Namun ada beberapa poin yang menurut peneliti belum tuntas dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan masih membutuhkan penelitian yang mendalam yaitu tentang kerjasama antara Wahhabi, Arab Saudi dan intelejen Inggris dalam pembentukan Kerajaan Arab Saudi Modern serta dampak politik dan sosial keagamaan yang ditimbulkan.

Maka dengan penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkap pengaruh-pengaruh politik dan sosial kemasyarakatan, termasuk di dalamnya pengaruh praktik keagamaan yang diakibatkan oleh kekuasaan Dinasti Arab Saudi pada abad

ke-19. Hal ini karena penulis melihat bahwa faktor yang berhubungan dengan praktik keagamaan belum begitu diangkat dalam karya-karya terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah pendekatan sejarah, dengan menggunakan studi perbandingan antara beberapa tulisan sejarah dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode sejarah. Oleh karena itu, sumber-sumber se-zaman dan ditulis oleh orang yang terlibat dan/atau menyaksikan peristiwa yang menjadi pembahasan karya tulis ini merupakan sumber yang sangat penting.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.²² Data-data yang dikumpulkan berupa data-data tulisan yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan.

²² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 176.

3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini disebabkan karena penelitian ini tidak berasal dari sumbernya langsung, melainkan berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan data-data lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, diantaranya:²³

a. Sumber / Bahan Hukum Primer

Yaitu buku-buku yang ditulis oleh para peneliti yang sangat *capable* dalam masalah sejarah dan perpolitikan di Semenanjung Arab, khususnya pada rentang waktu sekitar akhir abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20. Diantara karya yang dijadikan peneliti sebagai sumber rujukan utama adalah kitab karya Ahmad al-Sibā'ī yang berjudul *Tārīkh Makkah*. Karya ini menuturkan tentang sejarah perpolitikan Mekah dan perpindahan kepemimpinan politik di sana pada era sebelum kekuasaan dinasti Sa'ūd.

Sumber literatur lain yang dijadikan oleh peneliti sebagai sumber rujukan utama adalah *A History of The Arab Peoples* karya Albert Hourani. Dalam karya ini dijelaskan secara terperinci sejarah politik dan sosial keagamaan bangsa Arab dari sejak abad ke-17 sampai dengan abad ke-20.

b. Sumber / Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ahli sejarah yang sangat kompeten dan sangat bermanfaat untuk dijadikan pembanding sekaligus pelengkap dari

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), 30.

karya-karya rujukan utama. Diantara referensi pelengkap ini adalah karya Azyumardi Azra yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII, dan juga tulisan Ahmad Dallal, *The Origins and Objectives of Islamic Revivalist Thought (1750-1850)*.

c. Sumber / Bahan Hukum Tersier (Bahan Non Hukum).²⁴

Sumber / Bahan Hukum ini berupa kamus, ensiklopedi dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik pembahasan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah kepustakaan (*library research*). Telaah kepustakaan dilakukan dengan cara membaca karya subyek penelitian mengenai tema yang relevan dengan masalah sejarah Hijaz pada awal abad ke-19. Karya-karya yang ditulis se-zaman dengan objek yang diteliti dan/atau ditulis oleh orang yang terlibat langsung dalam kajian yang sedang diteliti sangat berharga dan menjadi bahan masukan yang sangat penting dalam penelitian ini, ditambah dengan sumber-sumber tambahan yang tidak kalah bergunanya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melandaskan teorinya pada teori *content analysis* atau analisis isi. Prosedur dasar dari analisis isi adalah mendesain kategori yang relevan dengan rancangan penelitian yang sedang dilaksanakan. Langkah awal dari analisis isi adalah melakukan klasifikasi menggunakan kategori-kategori, yaitu kategori sejarah dan kategori perubahan. Langkah selanjutnya adalah

²⁴ Ibid, 143.

menafsirkan dan menjelaskan (*interpretation and explanation*).²⁵ Dalam *content analysis* juga akan dipaparkan secara jelas penjelasan kontekstual seperti konteks politik, sejarah dan sosial. Dengan penjelasan tersebut diharapkan tujuan penelitian akan tercapai secara maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Objek analisis dalam penelitian ini adalah negeri Hijaz dengan mengambil fokus pada dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut didapat melalui penelusuran pada literatur-literatur, baik itu karya primer maupun karya-karya pelengkap. Hijaz adalah satu dari lima area di Jazirah Arab. Empat area lainnya adalah Yaman, Tihamah, Nejd, dan Arud. Kota-kota tersebut sekarang menjadi bagian dari Jazirah Arab.²⁶

Analisis penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan, sumber primer maupun sumber-sumber lain yang mendukung. Disamping itu, peneliti juga memperkaya dengan sumber-sumber yang berhubungan dengan ilmu politik Islam serta sejarah politik Islam untuk lebih mempertajam analisis yang sedang dilakukan dan juga untuk mengantarkan penulis pada kesimpulan yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, penelitian ini diakhiri dengan mempertimbangkan “titik jenuh” dari data-data yang ada. Jika data penelitian telah menunjukkan gejala “kejenuhan” maka segala proses penelitian dapat diakhiri dan dilanjutkan dengan penyimpulan. Pekerjaan menyimpulkan inilah yang menjadi akhir dari proses panjang penelitian.

²⁵ A. Khozin Afandi, *Langkah Praktis Merancang Proposal*, (Surabaya: Pustakamas, 2011), 120.

²⁶ Muḥammad Bayyūmī Maḥrān, *Dirāsāt fī Tārīkh al-‘Arab al-Qadīm* (Riyadh: al-Matābi’ al-Ahliyyah, 1997), 98.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, merupakan bagian awal dari penelitian yang dapat dijadikan sebagai awalan dalam memahami keseluruhan isi dari pembahasan. Bab ini berisi beberapa sub bagian meliputi; latar belakang permasalahan, fokus kajian dan kegunaan, kajian terdahulu, metodologi, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang sejarah Hijaz sebelum abad ke-19 yang secara khusus terfokus pada dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Pembahasan ini akan mendeskripsikan secara rinci tentang keadaan politik dan sistem pemerintahan, Hijaz dan *Nizhām al-Ashrāf*, potret aktifitas ibadah di Tanah Suci sebelum abad ke-19, model pendidikan di Tanah Suci sebelum abad ke-19, serta hubungan antara syariat dan tasawuf di kalangan penduduk Hijaz sebelum abad ke-19. Pembahasan ini dianggap signifikan untuk melihat posisi Hijaz sebelum dan sesudah era kerajaan Saudi Modern.

Bab *ketiga*, membahas tentang perubahan-perubahan politik di Semenanjung Arab 1800-1930 M. Dalam bab ini akan dibahas tentang awal hegemoni Eropa terhadap dunia Islam serta pengaruhnya terhadap Hijaz, muncul dan berkembangnya ideologi kebangsaan (nasionalisme) di Arab, peran Muhammad bin ‘Abd al-Wahhāb dan pengikutnya dalam gerakan politik Bani Su’ūd I, pendudukan Hijaz oleh Muhammad ‘Alī Pāshā dari Mesir, Peran *Sharīf* Husayn Dalam Revolusi Arab dan Berakhirnya Sistem *Nidzām al-Ashrāf* di Hijaz, serta jatuhnya Hijaz kembali ke bawah kekuasaan Dinasti Saudi.

Bab *keempat*, membahas tentang pengaruh berdirinya Arab Saudi terhadap praktik sosial keagamaan di Hijaz. Dalam bab ini akan dibahas tentang pengaruh berdirinya kerajaan Arab Saudi Modern terhadap pemurnian syariat Islam di Tanah Suci, pengaruh berdirinya kerajaan Arab Saudi Modern terhadap tradisi ibadah shalat berjamaah di Tanah Suci, pengaruh perubahan politik terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam di Arab Saudi, serta Hubungan antara Syariat dan Tasawuf di Tanah Suci setelah berdirinya Kerajaan Arab Saudi Modern.

Bab *kelima*, penutup, merupakan bagian yang menguraikan temuan dari penelitian. Bagian ini berisi kesimpulan dan implikasi teoritis.